



# KLIPING

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Sumber Berita: **RADAR TARAKAN**

TANGGAL:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			v																											

BULAN:

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
								v			

TAHUN

2015

HALAMAN

5b

## Kepala Daerah Berhati-hati akan Berdampak Pada Pembangunan

Tarakan, lanjut Ade menjelaskan, satu di antara kota yang tak menggunakan anggaran secara ideal. Idealnya, penggunaan anggaran sebesar 50 persen di semester satu. Berdasarkan catatan BPK, Tarakan presentase penggunaan anggaran semester I sebesar 25,24 persen dengan realisasi belanja Rp 273.333.856.196,96. "Karena ini setengah tahun pertama," jelasnya.

Saat ini, kebanyakan daerah atau kota melakukan pengeluaran anggaran pada akhir tahun dan tidak memanfaatkan pada anggaran di semester pertama sehingga akhirnya nanti akan terjadi penyimpanan prosedural.

"Kenapa tidak dilakukan secara awal saja, jika akan digenjut pada akhir tahun bisa jadi nanti akan terjadi penyimpangan prosedural," ungkap Ade.

Sampai pada akhirnya akan

menggunakan sistem basis akrual. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. Tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Sistem baru pun digunakan akan tetap sama menurut Ade, karena sistem perencanaan anggaran di Indonesia ini tidak begitu bagus, termasuk pencairan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atau provinsi terlalu lama.

"Paling cepat bulan April atau Mei terlalu lama, karena pemerintah tidak berani mengeluarkan sebelum ada persetujuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), mending kalau yang dikeluarkan disetujui kalau tidak disetujui kan merepotkan" keluh Ade.

Selain itu ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi dan menyebabkan penyerapan anggaran tidak ideal. Salah satunya ketakutan pada mekanisme penganggaran dan lainnya. "Siklusnya itu sendi-

ri sangat memungkinkan paling bisa di semester kedua yang akan meningkat penyerapan anggarannya," ujar Ade.

"Kepala daerah yang terlalu berhati-hati karena takut kepada peraturan takut pada hukum, akan berdampak tidak baik bagi daerah pimpinannya," ujar Ade.

Dengan begitu daerah akan mendapatkan dampak yang buruk menjadikan pembangunan dan pertumbuhan terlambat jika rasa khawatir kepala daerah itu terlalu berlebihan sehingga tidak berani mengambil keputusan.

"Memang dirinya (kepala daerah) akan aman tetapi daerahnya akan stuck dan tidak berkembang," tuturnya. Warga memilih kepala daerah selain harus memiliki inovasi juga yang diperlukan keberanian dalam mengambil keputusan, sehingga akan membawa hal positif bagi masyarakat.

"Sepanjang dirinya sendiri masih dalam rule, tidak usah takut lah," ungkap Ade. (\*/nri/asm)